

RINGKASAN

RESA KUSUMA PUTRI. 21105520008. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Blitar.* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Progam Studi Ilmu Administrasi Negara. 2025. Di bawah bimbingan: 1. Sutowo, S.Sos., M.A.P., 2. Ferida Asih Wilujeng, S.Sos., M.AP

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar kerap menimbulkan berbagai persoalan, seperti terjadinya kemacetan, terganggunya keindahan tata kota, serta pelanggaran terhadap ketentuan ruang publik. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban melalui kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Meski demikian, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih menuai pertanyaan, mengingat banyak pedagang kaki lima (PKL) yang tetap beraktivitas di lokasi terlarang meskipun telah dilakukan penertiban secara berulang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan lima indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Blitar dapat dikategorikan cukup efektif yakni 1) Produktivitas dilihat dari konsisten menjalankan patroli harian, 2) Kualitas layanan dilihat adanya sarana dan prasarana yang memadai, 3) Responsivitas dilihat dari kemampuan dalam merespons kebutuhan masyarakat, 4) Responsibilitas dilihat dari dalam melaksanakan penertiban sesuai dengan SOP dan 5) Akuntabilitas dilihat dari kerja sama yang baik dengan instansi terkait. Faktor-faktor pendukung meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, landasan hukum yang kuat, serta terjalinnya komunikasi yang baik dengan pedagang. Faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan, serta tuntunan agar Satpol PP bersikap tegas namun tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima*

SUMMARY

RESA KUSUMA PUTRI. 21105520008. *Effectiveness of Civil Service Police Unit (Satpol PP) Performance in Controlling Street Vendors in Blitar City.* Faculty of Social and Political Sciences. Public Administration Study Program. 2025. The Adviser: 1. Sutowo, S.Sos., M.A.P., 2. Ferida Asih Wilujeng, S.Sos., M.AP

The presence of street vendors (PKL) in Blitar City often causes various problems, such as traffic jams, disruption to the city's aesthetics, and violations of public space regulations. In this regard, the Public Order Agency (Satpol PP), as the agency tasked with enforcing Regional Regulations (Perda), plays a strategic role in maintaining order by regulating street vendors (PKL). However, the effectiveness of this task remains questionable, given that many street vendors continue to operate in prohibited locations despite repeated enforcement efforts.

This study aims to determine the effectiveness of the Public Order Agency (Satpol PP) in regulating street vendors (PKL) in Blitar City and to identify factors that support and hinder this process. The approach used in this study is descriptive qualitative, with data collection methods consisting of interviews, observation, and documentation.

Based on the results of research using five indicators proposed by Agus Dwiyanto (2006), the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors (PKL) in Blitar City can be categorized as quite effective, namely 1) Productivity seen from the consistency of carrying out daily patrols, 2) Quality of service seen from the availability of adequate facilities and infrastructure, 3) Responsiveness seen from the ability to respond to community needs, 4) Responsibility seen from implementing control in accordance with SOPs and 5) Accountability seen from good cooperation with related agencies. Supporting factors include the availability of supporting facilities and infrastructure, a strong legal basis, and good communication with traders. Inhibiting factors include traders' lack of understanding of the established rules, as well as guidance for Satpol PP to be firm but still prioritize the humanitarian side.

Keywords: *Effectiveness, Performance, Civil Service Police Unit, Order, Street Vendors*